

BAB IV

POLITIK KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA

PERSPEKTIF KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH

A. Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama

Seperti yang dikatakan penyair dan pengajar A. Mustofa Bisri (*Kompas*, 12/5/2004), NU adalah organisasi modern dan isinya tradisional. “Jarak” kedua dunia itu belum secara baik diatasi, Jama’ah sudah lahir sejak pesantren ada di dunia Nusantara, dan Jam’iyah baru lahir tahun 1926.¹ Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam membangun cita-cita bangsa. Hal ini tidak lain karena kontribusi Nahdlatul Ulama tidak hanya dialamatkan kepada jama’ah Nahdlatul Ulama, tetapi lebih besar dari itu bagaimana Nahdlatul Ulama bisa berkontribusi kepada bangsa.

Sebagai organisasi keagamaan, NU adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan warga negara baik

¹ Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 35.

sesama umat islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama lain untuk sama sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.²

Politik kebangsaan Nahdlatul Ulama sejatinya ialah membangun rumah Indonesia menjadi *Baldatun Thayyibun Warobun Ghafur*, tempat dimana Jama'ah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tinggal bersama saudara sebangsa yang lainnya.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Hasyr Ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Hasyr: 9)³

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum Anshor telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum sebelum kedatangan kaum

² Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Saleh, *NU dan Soekarno*, (Jogjakarta: LKiS, 2012) h. 82.

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pemerintah Provinsi Banten, 2014) h. 546.

Muhajirin. Yaitu pada Baiat Al-Aqabah pertama dan kedua. Mereka mencintai kaum Muhajirin dengan cinta kasih yang tulus. Mereka memprioritaskan kaum Muhajirin, sekalipun mereka dalam kesusahan. Ini termasuk Ayat berisi pujian Allah SWT kepada kaum Anshar yang telah membangun kota Madinah dengan baik dan mau menerima kaum Anshar dengan cinta kasih.

Melihat *Khittah An-Nahdliyyah* 1926, *Khittah* adalah satu kata dari Bahasa Arab yang berarti garis. Dalam NU, kata *Khittah* pertama kali diungkapkan oleh KH Achyat Chalimi (Mojokerto) pada tahun 1954, ketika berlangsung Muktamar NU ke-20 di Surabaya. Kiai Achyat saat itu mengusulkan, “NU harus kembali ke *Khittah*, agar tidak awut-awutan begini,” Namun usulan itu tidak disertai dengan konsep yang utuh, sehingga tidak mendapat banyak perhatian. Kata *Khittah* NU kemudian kembali menjadi perhatian nahdliyin pada Muktamar NU ke-26 pada tahun 1979 di Semarang. Dalam muktamar yang dilaksanakan pada 5-11 Juni 1979 itu, Sekjen PBNU waktu itu, KH Moenasir Ali, memesan buku berjudul *Khittah Nahdliyah* yang ditulis oleh KH Achmad Siddiq dalam jumlah besar. Buku kecil itu kemudian dibagi-bagikan kepada peserta muktamar tapi tidak menjadi

pembahasan muktamar.⁴ Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan bertujuan ikut membangun, mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.

1. Sikap Masyarakat Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merumuskan dasar-dasar keagamaan yang menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan:

- a. Sikap *tawasuth dan i'tidal*. Sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah kehidupan bersama
- b. Sikap *tasamuh*. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan
- c. Sikap *tawazun*. Sikap seimbang dalam berkhidmat. Menyerasikan khidmat kepada Allah, khidmat kepada sesama manusia, serta pada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang

⁴ Lihat selengkapnya di Situs Resmi Nahdlatul Ulama <https://www.nu.or.id/post/read/64294/hikayat-khittah-nu-1926> (diakses pada tanggal 02 Februari 2018, 15:15 WIB)

- d. Sikap *amar ma'ruf nahi munkar*. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan, merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁵

Dengan rumusan dasar ini, Nahdlatul Ulama telah berhasil melahirkan generasi bangsa yang mengedepankan hidup dalam suasana yang toleran dan moderat, bukan dengan kekerasan.

Konsepsi ini diperkuat dengan kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap ide-ide kebangsaan yang menjadi titik tolak dalam mendesain negara Indonesia. Tak berlebihan jika Nahdlatul Ulama terus menerus melestarikan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang paling ideal bagi bangsa Indonesia.⁶ Dalam kaitan dengan suasana hidup yang toleran dan moderat ini, fondasi besar sudah diletakkan oleh Nahdlatul Ulama ketika memelopori penerimaan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat yang mesti diterima oleh umat Islam.

⁵ Nur Khalik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 463.

⁶ Nur Khalik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*,,, h. 464.

2. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

Tujuan Nahdlatul Ulama sendiri terhadap paham keagamaannya adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlusunnah wal-Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi tercapainya rahmat bagi semesta.

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunnah wal-Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah ekstrim aqli (rasionalis) dengan Kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.⁷ Jadi selain mengutamakan dasar paham keagamaannya dari Al-Quran dan Sunnah Nahdlatul Ulama juga mengembangkan pemikiran-pemikiran terdahulu

⁷ Situs Resmi Nahdlatul Ulama, "Paham Keagamaan NU" (NU online), sumber diakses <https://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan> Diakses 16 Maret 2018.

yang telah disebutkan di atas. Menurut Ahmad Zahro, Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, as-Sunnah, *al-ijma'* dan *al-qiyas*.⁸ Berbeda dengan organisasi-organisasi tradisional yang lain, Nahdlatul Ulama tidak hanya mengaku sebagai penganut paham Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah, tetapi juga mengembangkannya secara lebih komprehensif.

Menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Aswaja adalah corak keberagaman umat Islam, baik pemahaman maupun praktik, yang didasarkan atas tradisionalisme madzhabiyah. Ia merupakan sistem ajaran Islam yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi dan para Sahabatnya. Untuk merinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama NU menempatkan kalam sebagai sistem kepercayaan, fikih sebagai norma yang mengatur kehidupan, serta tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak dan mencerahkan rohani, bukan sebagai ajaran yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam. Ulama NU telah merumuskan paham Aswaja tersebut secara lebih konkret untuk menjadi pegangan organisasi dan warga nahdliyin, yakni dalam *I'tiqad* menganut teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dalam fiqh mengikuti salah satu dari empat imam mazhab:

⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Penerbit: LKiSYogyakarta: 2004), h. 19.

Abu Hanafi, Maliki Ibnu Anas, Muhammad Idris asy-Syafi'I, dan Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan dalam tasawuf mengikuti ajaran Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.⁹ Sebagian kiyai berpikir tentang bagaimana mempermudah atau mengorganisir pelaksanaan haji secara lebih baik, atau bagai mana membuat orang beriman lebih mudah untuk mengetahui makanan kemasam yang halal atau haram. Tetapi kebanyakan anggota muda Nahdlatul Ulama lebih berpikir dalam kerangka keadilan sosial dan pengembangan masyarakat.¹⁰

Selain itu, Nahdlatul Ulama juga bercita-cita untuk mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai, dan menusiawi menuntut saling pengertian dan saling memerlukan, dan untuk mewujudkan Nahdlatul Ulama bertekad untuk mengembangkan *ukuwah Islamiyah*, *ukuwah Wathoniyah*, dan *ukuwah Insaniyah* yang mengemban kepentingan nasional dan internasional dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip *al-ikhlas* (ketulusan), *al-'adalah* (keadilan), *at-tawassuth* (moderasi), *at-tawazun* (keseimbangan) dan *at-tasamuh* (toleransi), dengan tetap

⁹ Djohan Effendi, *Pembauran Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, (Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 103-104.

¹⁰ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS 1994), h. 140.

menjungjung tinggi semangat yang melatarbelakangi berdirinya dan prinsip-prinsip yang ada dalam Qanun Asasi.¹¹ Untuk mengaplikasikan pemahaman keagamaannya, Nahdlatul Ulama memiliki tujuan-tujuan tertentu agar menjadi tolak ukur terhadap pemahamannya kepada kader-kadernya dan kepada semua masyarakat untuk menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi tradisional dengan pemikiran, pemahaman keagamaan yang mengedepankan kemaslahatan umat.

3. Sembilan Pedoman Politik Nahdlatul Ulama

Terkait dengan perjalanan politik Nahdlatul Ulama kedepan, dengan penuh keyakinan Mbah Muchith menggaris bawahi apa yang tercantum dalam “Pedoman Berpolitik bagi Warga Nahdlatul Ulama” . Adapun pedoman tersebut yaitu:

- a. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

¹¹ Ibnu Manshur *Dalam ADRT NU Tahun 2010*, (online) sumber diakses dari <https://www.muslimedianews.com/2013/10/tujuan-nu-berlakunya-ajaran-Islam.html> Diakses pada 20 Maret 2018.

- b. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan, dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudkan masyarakat yang adil lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan diakhirat
- c. Politik bagi warga Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama
- d. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, berkepribadian yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- e. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat

mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama

- f. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam ahlussunnah wal jama'ah
- g. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan
- h. Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan menghargai antara yang satu dengan yang lain, sehingga dalam politik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan lingkungan Nahdlatul Ulama'
- i. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu

melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi dalam pembangunan.¹²

4. Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama

Seiring kompleksitas perkembangan politik di Indonesia, perjalanan politik Nahdlatul Ulama juga berkembang. Nahdlatul Ulama juga mulai bersentuhan dengan politik kenegaraan (kebangsaan), terutama menjelang dan pascakemerdekaan. Persentuhan ini merupakan pengaruh gerakan nasionalisme di beberapa negara yang bergerak menuju kemerdekaan. Kontribusi politik kenegaraan Nahdlatul Ulama yang paling jelas adalah dukungan Wahid Hasyim, wakil Nahdlatul Ulama pada PPKI, untuk tidak mencantumkan Piagam Jakarta di dalam dasar negara kita.¹³ Selain itu, selama menjadi organisasi sosial, juga politik keagamaan, Nahdlatul Ulama tidak pernah terlibat kasus-kasus pemberontakan Islam. Komitmen terhadap negara dan bangsa diletakkan di atas segala-galanya karena Nahdlatul Ulama menyadari, eksistensi negara adalah hal utama bagi kehidupan agama dan manusia sesuai dengan garis *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.¹⁴ Nahdlatul Ulama dalam

¹² Ayu Sutarto, *Menjadi NU Menjadi Indonesia: Pemikiran K.H. Abdul Muchith Muzadi*, (Surabaya: Khalista, 2008), h. 47-49.

¹³ Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, h. 4-5.

¹⁴ Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, h. 5.

menjalankan perpolitikannya tidak hanya untuk organisasinya sendiri melainkan untuk kepentingan negara yang telah disebut kan di atas.

Dengan itu Nahdlatul Ulama memiliki beberapa model politik. Dua model politik Nahdlatul Ulama itu adalah kerakyatan dan kenegaraan, merupakan pengalaman paling ideal dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Dua model inilah yang menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan umum (*mashalah 'ammah*). Namun, NU ternyata tidak mampu mempertahankan dua model politik ini karena godaan politik kekuasaan, baik dari tokoh Nahdlatul Ulama sendiri maupun dari luar Nahdlatul Ulama. Keterlibatan pertama Nahdlatul Ulama dengan politik kekuasaan adalah dukungan organisasi terhadap pendiri Masyumi. Keterlibatan Nahdlatul Ulama terhadap politik kekuasaan bukan hanya karena godaan politik tersebut. Melainkan adanya faktor-faktor pendorong lain kepada Nahdlatul Ulama untuk memasuki ranah perpolitikan. Karena keterlibatan itu dimuali dari bergabungnya Nahdlatul Ulama ke dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad dan beberapa organisasi Islam lainnya. Nahdlatul Ulama juga mendukung berdirinya Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) pada tahun 1939. Secara

formal, keterlibatan dalam dunia politik dimulai pada saat Nahdlatul Ulama menjadi salah satu unsur organisasi dalam partai politik Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Namun kipra Nahdlatul Ulama di Masyumi tidak berlangsung lama. Persinggungan kepentingan dan konflik lama antara kubu tradisional dengan modern kembali mengemuka di partai itu. Pergeseran peran politik kader Nahdlatul Ulama di Masyumi yang dilakukan oleh sekelompok Islam modernis dan intelektual Islam melahirkan kekecewaan politik pada kalangan Nahdlatul Ulama.¹⁵ Akhirnya keraguan dari sebagian kalangan kadernya terhadap keputusan Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, terjawab melalui pemilu 1955.

Nahdlatul Ulama berhasil membuktikan dirinya sebagai partai politik yang harus diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional. Dalam pemilu itu, Nahdlatul Ulama mampu menempati posisi ketiga setelah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Masyumi dengan memperoleh 45 kursi DPR (18,4% suara). Di satu sisi, hasil itu semakin meneguhkan kepercayaan diri warga Nahdlatul Ulama, namun di sisi lain semakin menjadi magnet untuk menyeret Nahdlatul Ulama ke

¹⁵ Bahrul 'Ulum. *Bodohnya NU apa NU DI Bodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*. (Semarang: Ae Ruzz Press & PWIPNU Jawa Tengah. 2002), h. 55-80.

dalam pergelutan politik yang lebih pragmatis dan mengakibatkan khittah awal sebagai organisasi sosial keagamaan.¹⁶ Nahdlatul Ulama kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada Muktamar NU di Situbondo, Nahdlatul Ulama menyatakan diri untuk ‘kembali ke Khittah 1926’, yaitu untuk tidak lagi berpolitik praktis. Setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Hal terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi di DPR dan mengantarkan Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 Kursi DPR.¹⁷ Dengan mendapatkan peluang memperoleh kursi di DPR Nahdlatul Ulama semakin jauh memasuki ranah perpolitikan dan tidak hanya menjadi ormas Islam akan tetapi menjadi Nahdlatul Ulama telah menjadi organisasi politik atau parpol.

Menurut Greg Fealy, tujuan politik Nahdlatul Ulama saat menjadi parpol adalah 1) penyaluran dana pemerintah terhadap

¹⁶ Ichwan Arifin. Tesis “Kiai dan Politik”, *Disertasi* (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008). h. 20.

¹⁷ Asep Ahmad Hidayat dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 250.

Nahdlatul Ulama, 2) mendapat peluang bisnis, dan 3) menduduki jabatan birokrasi.¹⁸ Tiga tujuan politik seperti itu, tampaknya justru menyebabkan Nahdlatul Ulama dalam kubangan orientasi politik materialistis, lalai pada politik kerakyatan, bahkan Nahdlatul Ulama dituduh sebagai oportunis dan akomodasionis.

5. Doktrin Politik Nahdlatul Ulama

Sebagai partai-partai Islam tradisional lainnya, Nahdlatul Ulama mengambil gagasan-gagasan politik Sunni klasik sebagai rujukan teoritis utama. Kutipan dari karya-karya al-Mawardi, al-Ghazali, al-Baqillani, dan yang lainnya banyak ditemukan dalam teks-teks Nahdlatul Ulama.¹⁹ Dasar formal pendekatan politik Nahdlatul Ulama di dalam yurisprudensi abad pertengahan. Kebanyakan tokoh Nahdlatul Ulama pada 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren, yang mata ajarannya adalah ilmu fiqh. Bagi kaum tradisional, fiqh merupakan ratu ilmu pengetahuan.²⁰ Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik Nahdlatul Ulama dapat dibagi menjadi tiga kategori utama diantaranya ialah kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Ketiga kategori ini saling berkaitan dan

¹⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 165.

¹⁹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, h. 65.

²⁰ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 168.

dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan pada prinsip-prinsip fiqh. Istilah kebijakan dalam hal ini digunakan dalam pengertian yang netral, yaitu pengambilan tindakan yang kondusif bagi upaya manfaat atau menghindari kerugian.²¹ Ciri kedua dari pemikiran politik Nahdlatul Ulama adalah sikap luwes. Keluwesan dalam pengambilan keputusan itu sebagaimana merupakan wujud penerapan kaidah fiqh suatu krisis memerlukan perhitungan-perhitungan baru tentang keuntungan dan kerugian sehingga sikap atau posisi sebelumnya dapat dipertimbangkan kembali.

Sedangkan moderatisme dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghindari tindakan yang ekstrem dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat. Dalam wacana Nahdlatul Ulama, gagasan tersebut digambarkan secara jelas. Perilaku moderat terutama kecenderungan untuk memilih cara yang umum disebut sebagai 'pendekat jalan tengah', ditemukan dalam pemikiran Islam maupun ciri ideal budaya Jawa.²² Nahdlatul Ulama tidak hanya sekedar terjerumus kedalam ranah politik tapi Nahdlatul Ulama juga memanfaatkan keadaan tersebut dan dijadikan untuk kepentingan

²¹ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*,, h. 66-67.

²² Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*,, h. 73-77.

organisasinya sendiri. Nahdlatul Ulama juga tidak hanya untuk sekedar menjadi organisasi Islam seperti biasanya sehingga Nahdlatul Ulama mempunyai doktrin-doktrin politik tertentu untuk melancarkan perpolitikannya, yang sudah di jelaskan di atas. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam Nahdlatul Ulama juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.

Belakangan ini Nahdlatul Ulama sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus Nahdlatul Ulama hampir di setiap lapisan kepengurusan Nahdlatul Ulama.²³

6. Nahdlatul Ulama dan Politik

Pertama kali Nahdlatul Ulama terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. Nahdlatul Ulama cukup berhasil dengan meraih 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin Nahdlatul Ulama

²³ Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 24.

dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) memberontak, Nahdlatul Ulama tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan Partai Komunis Indonesia, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.²⁴ Nahdlatul Ulama kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo, Nahdlatul Ulama menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926 yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.²⁵ Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan oleh KH. Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.

²⁴ Khamami Zada, A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan*, h. x.

²⁵ Amin Masyhur, *NU & Ijtihad politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: AL-Amin, 1996), h. 76.

7. Tujuan Politik Nahdlatul Ulama

Cara yang paling jelas bagaimana politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan Islam adalah melalui penegakan hukum dan pembuatan undang-undang. Tujuan utamanya adalah memastikan agar syariat Islam dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, mencakup penerapan aspek-aspek hukum pernikahan dan waris, peraturan pembayaran dan penyaluran zakat, penetapan waktu pelaksanaan shalat Jum'at atau kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan, dan sebagainya.²⁶ Tujuan politik Nahdlatul Ulama terdiri dari tiga bagian utama yang dalam teori sangat berhubungan dengan tujuan keagamaan. *Pertama*, menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat Nahdlatul Ulama, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan, seperti pesantren, madrasah, dan masjid; dan juga membangun merawat perasarana sosial, seperti klinik kesehatan, panti asuhan, dan balai pertemuan. *Kedua*, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah bagi Nahdlatul Ulama dan penduduknya. Peluang yang semacam ini akan memberikan keuntungan langsung kepada mereka yang mampu mendapat kedudukan dan dianggap dapat membantu Islam dan umat pada umumnya. Semakin sejahtera anggota masyarakat semakin meningkat

²⁶ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, h. 82.

pula kemampuan mereka untuk memnuhi kewajiban sosial dan keagamaannya, seperti menunaikan ibadah haji, membayar zakat, dan mendukung upaya peningkatan pendidikan Islam dan kesejahteraan.²⁷ Tujuan politik *ketiga* adalah mendapatkan kedudukan bagi anggota Nahdlatul Ulama dalam birokrasi.

Selama masa kolonial, santri tradisional umumnya menjauhkan diri dari lembaga pemerintahan dan mengembangkan usaha di sector-sektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dipandang sebagai jalan menuju mobilitas dan status sosial. Masuknya muslim tradisionaldalam birokrasi dipandang akan meningkatkan kedudukan Nahdlatul Ulama di masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat suara umat di kalangan pemerintah.²⁸ Tujuan politik lain yang sama pentingnya bagi Nahdlatul Ulama adalah menjamin peningkatan kondisi sosial-ekonomi pendukung tradisionalisnya. Tujuan ini kadang-kadang tersirat dalam literature Nahdlatul Ulama, namun jarang dibahas secara terang-terangan. Walaupun demikian, pentingnya motivasi politik ini terlihat lebih jelas dalam forum-forum partai korespondensi internal partai.²⁹ Ternyata ketiga motivasi ini adalah

²⁷ Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in Indonesia World: Ulama of Madura*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), h. 261.

²⁸ Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in Indonesia World: Ulama of Madura*,, h. 84.

²⁹ Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in Indonesia World: Ulama of Madura*,, h. 82.

asumsi bahwa kemajuan sosioal dan ekonomi merupakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Islam. Kekurangan materi dan ketidak berdayaan politik masyarakat muslim akan menyulitkan pelaksanaan ibadah dan syi'ar Islam.

Selain itu, muslim yang miskin tidak dapat diharapkan bisa melaksanakan rukun Islamnya, terutama menunaikan ibadah haji dan membayar zakat. Kaitan antara kesejahteraan masyarakat dan religiositas terkandung dalam konsep *Izzul Islam wal Muslimin*, yang arti harfiahnya adalah 'keagungan Islam dan umatnya'. Ini didasarkan pada keyakinan dalam sikap dan tindakan umat Islam. Mereka harus mempunyai kebanggaan akan agamanya, berjuang menegakkan dan menyebarkan ajarannya serta menciptakan umat yang adil, makmur, dan dinamis, yang pantas sebagai penganut keyakinan yang benar.³⁰ Konsep lain yang serupa adalah *Mabadi' Khaira 'Ummah*, yang merupakan perinsip-perinsip kebaikan bagi umat, yang dirumuskan pertama kalinya oleh Machfoedz Sddiq pada akhir 1930-an. Konsep ini difokuskan pada masalah sosial-ekonomi dan bertujuan untuk membangun kemampuan swadaya umat melalui usaha-usaha bersama. Yang melandasinya adalah keyakinan bahwa Islam tidak akan dapat mewujudkan aspirasi dan keagamaannya tanpa landasan ekonomi yang

³⁰ Achmad Siddiq, *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama (fikiran Nahdliyah)*. Jember: PMII Tjacabg Djember, 1969, h. 12.

kuat.³¹ Bahwa tidak begitu mengherankan bila Nahdlatul Ulama merasa perlu memberikan penekanan pada aspek-aspek sosial-ekonomi ini, mengingat kuatnya budaya wiraswasta di kalangan umat Islam tradisional dan sudah sejak lama perhatian organisasi tercurah pada kesejahteraan materiil anggotanya.

Menurut Ali Haidar, walaupun pada awalnya tujuan Nahdlatul Ulama dicapai melalui kegiatan nonpolitik di sektor swasta, organisasi ini ternyata semakin tenggelam dalam kegiatan politik selama 1930-an dalam upaya untuk melindungi kepentingan ekonominya dalam persaingan dengan orang-orang Belanda dan Cina.³²

B. Politik Kebangsaan Menurut KH. Abdul Wahab Chasbullah

Kiai Wahab sebagai seorang aktivis kawakan yang berkarir sejak zaman Kabangkitan Nasional tahun 1914-an, tidak kaku, tidak canggung menghadapi pancaroba politik yang terjadi tahun 1950-an yang penuh tantangan, serta dalam menghadapi situasi politik 1960-an yang penuh gejolak, serta menghadapi pengalaman politik tahun 1970-an yang penuh tekanan, semua dilalui dengan gagah, dan penuh ketegaran.

³¹ Lihat komentar Idham Chalid dalam *Buku Kenang-Kenangan Mu'tamar ke XXII*, h. 101.

³² Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Geramedia), 1994, h. 98.

Sepuluh tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, KH Wahab Chasbullah mendirikan *Nahdlatul Wathan* (kebangkitan tanah air) yang berusaha menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan. Organisasi ini adalah langkah kongkret dari forum diskusi *Taswirul Afkar* (konsepsi pemikiran) yang sebenarnya merupakan antisipasi Wahab Chasbullah menghadapi ekses gerakan pembaharuan yang menjadi ancaman bagi eksistensi tradisi *Ahlussunnah wal Jamaah*. Dalam perkembangannya, *Nahdlatul Wathan*lah sebenarnya dapur pemikiran lahirnya Nahdlatul Ulama.³³ Bagi Kiai Wahab politik bukan sebagai tujuan, akan tetapi sekedar alat dan wadah untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Sama halnya bagi Nahdlatul Ulama tujuan politik adalah membangun bangsa yang bertaqwa dan berakhlak luhur untuk membangun suatu Negara yang aman dan makmur yang menjunjung tinggi keadilan.

Tetapi tujuan yang terakhir tentulah mencapai keridlaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Karena politik merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian, sementara pengabdian itu tidak mengenal batas waktu dan batas usia, karena itu Kiai Wahab berpolitik dan memimpin Nahdlatul Ulama sampai akhir hayatnya dengan penuh optimism dan

³³ A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan LkiS, 1995), h. 48.

penuh kesungguhan.³⁴ Kiai Wahab memiliki peran politik besar saat negara ini mau berdiri dan setelah negara ini berdiri, terutama dalam revolusi kemerdekaan dan juga dalam perundingan Renville, Perjanjian Linggarjati maupun Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam peristiwa itu Kiai Wahab menunjukkan kepiawaiannya sebagai politisi pesantren yang mampu mengalahkan politisi berpendidikan Belanda.

1. *Membangun Infrastruktur Organisasi*

Pada tahun 1914 Taswirul Afkar hanyalah sekelompok diskusi saja. Kelompok diskusi yang dibentuk karena bubarnya Sarekat Islam (SI) di Mekkah tersebut, meskipun terlihat kecil. Kegiatan dari pada kelompok tersebut dapat menarik perhatian para ulama baik dari golongan tradisi, pembaru, maupun dari kelompok nasionalis. Hal ini menandakan bahwa betapa penting adanya kebebasan dalam keberagaman terutama kebebasan berfikir dan berpendapat.

Pada mulanya kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Akan tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu yang relative singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik

³⁴ Abdul Mun'im DZ (ed), KH Abdul Wahab CChasbullah: *Kaidah Berpolitik dan Bernegara*, (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2015), h. 1xiii .

perhatian dikalangan pemuda.³⁵ Ini merupakan buah usaha dari Kiai Wahab, ia membuka diri untuk bertukar pikiran dengan ulama-ulama yang lain. Berkat pemikiran-pemikiran dan perna Kiai Wahab di Taswirul Afkar pula maka kelompok diskusi tersebut juga masuk dalam beberapa Kongres yang di selenggarakan oleh HOS Tjokroaminoto. Salah satunya adalah kongres diadakan di Cirebon. Kiai Wahab sebagai perwakilan dari Taswirul Afkar yang pada saat kongres bertujuan untuk meredam dua golongan yang berdebat tentang permasalahan *khilafiyah*. Golongan pembaru tetap bersikukuh agar umat Islam hanya berpedoman agama berdasarkan Alquran dan Hadis saja tidak pada yang lain-lain seperti madhab imam besar. Kiai Wahab tetap mempertahankan pahamnya untuk tetap mengikuti dan menghormati imam empat madhab. Pada tahun 1918 Taswirul Afkar berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan. Namun, kegiatan diskusi tetap berlanjut. Berubahnya lembaga pendidikan Taswirul Afkar berkat Kiai Wahab juga karena dirasa pendidikan sangat diperlukan pada waktu itu.

2. Membentuk Koperasi *Sjirkah al-Inan*

Lembaga pendidikan Taswirul Afkar dibentuk sebagai sebuah kelompok diskusi di antara para ulama dari berbagai organisasi dan

³⁵ Wikipedia, “Abdul Wahab Chasbullah”, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul Wahab Chasbullah](https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Wahab_Chasbullah) diakses pada 21 Maret 2018

pesantren di Jawa untuk mendinamisir masalah pemikiran kebangsaan. Selain berupa sebuah wadah kelompok diskusi, Taswirul Afkar juga dikembangkan menjadi sebuah lembaga pendidikan. Sebagai organisasi yang non-kooperatif terhadap Belanda dengan sendirinya organisasi tidak mendapatkan santunan dana dari pemerintah colonial.³⁶ Untuk memperkuat pendanaan gerakannya itu maka kemudian mendirikan sebuah gerakan saudagar yang disebut dengan (Nahdlatul Tujar) sebagai pusat penggalangan dana perjuangan Islam dan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1918, KH. Abdul Wahab Chasbullah mendirikan Nahdlatul Tujjar yaitu organisasi kewirausahaan yang berarti kebangkitan pedagang. Maksud dari pendirian organisasi ini jelas untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Islam tradisional yang secara umum masih sangat miskin.³⁷ Nahdlatul Tujjar merupakan sebuah usaha perdagangan dalam bidang pertanian yang berbentuk koperasi dengan istilah *Sjirkah al-Inan*. Lembaga yang resmi dioperasikan pada tahun 1918 tersebut meliputi para pedagang dari Surabaya dan sekitarnya dengan KH. Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan KH. Abdul

³⁶ Abdul Mun'im DZ (ed), KH Abdul Wahab CChasbullah: *Kaidah Berpolitik dan Bernegara,,* h. xx

³⁷ Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Saleh, *NU dan Soekarno,,* h. 21.

Wahab CChasbullah sebagai bendahara dan penasehat dalam menjalankan koperasi tersebut.

3. *Perintis Nahdlatul Ulama 1926*

KH. Abdul Wahab Chasbullah dikenal sebagai kiai pergerakan. Beliau aktif mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Dimulai ketika berada di Makkah, bersama Abbas dari Jember, Asnawi dari Kudus, dan Kiai Dahlan dari Kertosono. Kepedulian Kiai Wahab dan para kiai lainnya untuk mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) Cabang Makkah untuk menunjukkan rasa nasionalisme mereka yang tinggi. Mereka ingin agar Indonesia (Hindia Belanda) segera terlepas dari cengkraman penjajah asing. SI menjadi kendaraan yang tepat saat itu karena merupakan organisasi dengan jumlah pengikut paling besar.

Kiai Wahab bersama Mas Mansur juga mendirikan Madrasah Nahdlatul wathan di Kampung Kawatan Gang IV, Surabaya, pada tahun 1916. Kata *Nahdlatul Wathan* artinya “kebangkitan tanah air”. Sesuai dengan namanya, madrasah ini dirikan Kiai Wahab untuk membangun kesadaran politik melalui jalur pendidikan. Lagi-lagi disini

terlihat betapa besar rasa nasionalisme yang dimiliki Kiai Wahab.³⁸ Lalu, Kiai Wahab menemui Kiai Bisri, sahabat akrab sekaligus adiknya, untuk diajak keliling pulau Jawa guna meminta dukungan dari para kiai lainnya. Keduanya berkeliling mulai dari Banyuwangi disebelah timur hingga ke Menes Banten disebelah barat serta ke Madura. Dengan membawa nama besar Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab dan Kiai Bisri menemui sejumlah kiai. Para kiai yang mereka temui ialah teman-teman mereka sewaktu belajar di Pesantren Tebuireng maupun di Makkah. Para kiai tersebut termasuk orang-orang yang pernah bergabung dalam wadah Taswirul Afkar, Madrasah Nahdlatul Wathan dan Syubbanul Wathan.

Tepat pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M, para tokoh kaum muslim tradisional atau para pengasuh pesantren ini berkumpul di rumah Kiai Wahab Chasbullah di Kertopaten, Surabaya. Ada Hadrotusyaikh Hasyim Asy'ari Jombang, KH. Bisri Syansuri Denanyar Jombang, KH. R. Asnawi Kudus, KH. Mas Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Mujahid Semarang, KH. Ma'shum Lasem (ayah KH. Ali Ma'shum Krapyak Yogyakarta), KH. Nahrawi Thahir Malang, KH. Doro Muntaha Bangkalan Madura (menantu Syaikhona

³⁸ M. Solahudin, *Nakhoda Nahdliyyin*, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2013) h. 44

Muhammad Kholil), KH. Abdul Hamid faqih sedayu Gresik, KH. Abdul Halim Leuminunding Cirebon, KH. Ridlwan Abdullah Bubutan Surabaya, Syaikh ahmad Ghana'im al-Mishri, dan lain lain.³⁹

4. *Kiai Pemikir Nasionalisme*

Kesadaran nasionalisme Kiai Wahab Chasbullah sudah muncul ketika ia ikut membidani lahirnya Sarekat Islam (SI) Cabang Makkah. Ia melihat penjajahan telah mengakibatkan rusaknya seluruh tatanan masyarakat Indonesia. Penderitaan, kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan, terkuras, baik materi maupun ruhani. Namun demikian, beliau juga mengetahui bahwasanya penjajah lebih kuat, maju, cerdas dan canggih persenjataannya serta lebih modern organisasi pasukannya, sementara kita masih tercerai-berai, berjuang sendiri-sendiri sehingga akhirnya perjuangan Pangeran Diponegoro dan Pattimura memberikan contoh kegagalan dalam melawan penjajah Belanda secara frontal dan fisik.

Konsep nasionalisme KH. Abdul Wahab Chasbullah tercermin pula dari perjuangannya melawan penjajah yang dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi yang diorganisasikan melalui *Nahdlatut Tujar* pada tahun 1918. Sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama di tahun 1926.

³⁹ M. Solahudin, *Nakhoda Nahdliyyin,,* h. 53.

Tahun 1918 ia ikut mendirikan badan kerja sama perdagangan antara orang-orang Islam dari Jombang dan Surabaya bernama Nahdlatul Tujar.⁴⁰ Didalam organisasi ini, Kiai Wahab Chasbullah duduk dalam posisi penting sebagai bendahara dan penasihat resmi. Sedangkan, Kiai Hasyim Asy'ari menjabat sebagai ketua. Meski berumur pendek, organisasi ini berhasil menjadi perintis bagi usaha-usaha selanjutnya (meski sering gagal/rugi) untuk membangun jaringan kerja sama antar masyarakat Islam tradisional. Bentuk nasionalisme lain yang dilakukan beliau ialah dengan melakukan advokasi kepada para pejuang dan penggerak organisasi Nahdlatul Ulama ketika banyak tokoh Nahdlatul Ulama saat itu ditangkap oleh Nippon/Jepang. Beliau melakukan upaya pembebasan terhadap Kiai Hasyim Asy'ari dan dua belas tokoh ulama NU di Jawa saat itu. Ini membuktikan secara jelas bagaimana peran Kiai Wahab Chasbullah dalam melakukan perjuangan nasionalisme itu dalam segala bidang.

Hal tersebut dilakukan secara konsisten ketika Indonesia merdeka. Ketika penjajah Belanda beserta sekutunya akan menjajah kembali Indonesia, ia turut serta mengorganisir lascar-laskar untuk melakukan perlawanan perang gerliya, bekerjasama dengan tokoh

⁴⁰ Muhammad Rifa'I, *KH Wahab Chasbullah Biografi Singkat 1888-1971*, (Jogjakarta: Garasi House Of Book, 2014) h. 136.

pejuang yakni Bung Tomo serta Panglima Jendral Soedirman. Perang 10 November tahun 1945 di Surabaya sudah menjadi bukti bagaimana pahlawan dalam melakukan pertahanan atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, bentuk nasionalisme Kiai Wahab Chasbullah tercermin dalam perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama dalam rapat pembentukan dasar Megara yang berdasarkan Pancasila dalam sidang BPUPKI dengan meninggalkan egoism ideologism bahwasanya Islam harus dijadikan dasar bernegara secara simbolis.⁴¹ Menurut mereka, yang terpenting adalah nilai Islam itu sudah tercakup dalam Pancasila dan Pancasila secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang mempunyai sumber hukum Al-Qura'an dan Al-Hadits.

5. Mengintegrasikan Islam dengan Pancasila

Langkah politik Kiai Wahab yang dinamis sering disalahpahami bahkan dimanipulasi oleh kelompok lain terutama kelompok Islam modernis untuk membenarkan sikap politik mereka sekaligus mencari dukungan warga Nahdlatul Ulama. Begitulah upaya kelompok modernis Islam ketika melancarkan propaganda pendirian Negara Islam

⁴¹ Muhammad Rifa'i, *KH Wahab Chasbullah Biografi Singkat 1888-1971*, h. 140.

dan ketika melakukan kampanye khilafah Islamiah di tengah Negara Indonesia saat ini.

Hubungan Kiai Wahab dengan kelompok Islam lainnya memang terjadi semenjak ia aktif dalam sarekat Islam (SI) di Mekkah. Tetapi karir itu tidak dilanjutkan karena adanya perbedaan mendasar dari segi fisi dan filosofi. Kiai Wahab dan kaum santri pada umumnya menghendaki adanya negara bangsa yang bersumber dari tata nilai budaya setempat. Sementara SI dan kalangan Islam modernis lainnya lebih menghendaki Pan Islamisme, yang sesuai dengan ide tentang khilafah. Sikap kelompok modernis termasuk yang ada dalam SI, Muhammadiyah, Persis dan Al Irsyad yang agresif menyerang seluruh amaliyah ubudiyah kaum ulama bermadzhab yang ada di pesantren.⁴² Diselenggarakannya Kongres Al-Islam yang dipelopori SI, malah menjadikan ajang caci-maki terhadap kaum bermadzhab, sehingga Kiai Wahab beserta para kiai lainnya harus mempertahankan diri. Karena itu secara perlahan Kiai Wahab dan ulama pesantren lainnya mulai menghindari hadir dalam Kongres Al-Islam. Bahkan terakhir dalam penentuan delegasi menghadiri Muktamar Dunia Islam di Mekkah kalangan Islam bermadzhab ditinggalkan. Melihat adanya perbedaan

⁴² Abdul Mun'im DZ (ed), KH Abdul Wahab CChasbullah: *Kaidah Berpolitik dan Bernegara,,* h. xliii.

yang tidak lagi bisa dikompromikan itu para ulama mendirikan organisasi tersendiri dikalangan ulama bermadzhab dengan membentuk Nahdlatul Ulama. Disini para ulama menegaskan diri sebagai penerus Islam Nusantara yang dikembangkan para wali dan sultan sepanjang abad. Mereka kemudian menegaskan bahwa Negara Indonesia ini sebagai Negara Islam, karena negeri ini dihuni oleh umat Islam, hanya saja saat itu masih dalam penjajahan. Kongres Al-Islam terus berjalan tanpa keikutsertaan NU, tetapi ditengah jalan mereka menghadapi persoalan besar yaitu kolonialisme yang semakin agresif merepresi Islam, ditambah lagi kalangan blandis yaitu kaum kejawen yang semakin gencar menyerang Islam, sementara kalangan Islam belum mempunyai mekanisme untuk menagkisnya. Melihat kenyataan itu Kiai wahab CChasbullah dan Kiai Dahlan (NU) mengajak beberapa ulama modernis yaitu Mas Mansyur (Muhammadiyah) dan Wondoamiseno (SI) untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Kemudian diadakan pertemuan di Pesantren Kebon Dalem tahun 1973. Disitu kemudian didirikan Majlisul Islam A'la Indonesia (MIAI).⁴³ Walaupun Kiai Wahab dan Kiai Dahlan hadir sebagai perintis MIAI, tetapi masuk secara pribadi, belum membolehkan NU secara organisasi masuk

⁴³ Maksoem Machfudz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Penerbit: Yayasan Kesatuan Umat, Surabaya 1982) h. 54-56.

MIAI, karena ada beberapa persoalan yang belum selesai.pertama, NU menghendaki MIAI melanjutkan Kongres Al-Islam yang gagal. Kedua, persoalan khilafiyah atau perbedaan kecil-kecil mengenai Islam harus dihentikan, karena mengganggu kerukunan.Ketiga, NU menolak Ahmadiyah masuk sebagai anggota.Setelah semuanya jelas, maka pada tahun 1939 NU secara organisatoris bergabung dengan MIAI. Dalam kongres yang diadakan pada tahun 1940 bertempat di Surabaya juga, KH. Wahid Hasyim (NU) ditetapkan sebagai Ketua Umum MIAI, sementara wakilnya Wondoamiseno (SI) anggota dari Muhammadiyah, AL Irsyad dan Persis. Setelah KH. Wahid Hasyim mengundurkan diri karena sibuk mengurus Pesantren Tebuireng, kedudukannya digantikan oleh Wondoamiseno (SI).⁴⁴ Dalam upaya mengkampanyekan penerapan syariat Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam menggantikan Pancasila dewasa ini, kelompok Islam puritan dan kelompok fundamentalis Islam secara gegabah menggolongkan Kiai wahab sebagai penggagas Negara Islam, dengan merujuk pada berbagai pernyataan Kiai wahab dalam sidang Konstituante, yang memang menghendaki Kiai Wahab sangat berbeda dengan yang dibayangkan

⁴⁴ Lihat sejarah berdirinya MIAI dan Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Penerbit: Duta Aksara, Surabaya 2010) h. 102-104.

oleh kelompok modernis, termasuk kelompok fundamentalis belakangan ini.

Kelompok modernis jelas menghendaki Negara Islam yang eksklusif dan puritan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara Kiai Wahab lebih menghendaki berlakunya syariat Islam baik di masyarakat maupun para penyelenggara Negara, yang tidak semata mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, tetapi mengacu pada sejarah kebudayaan Islam Nusantara yang telah berkembang selama belasan abad, yang ini kemudian pada kemudian pada tahun 1945 oleh para *founding fathers* republik ini dirumuskan dengan Pancasila. Karena itulah dalam sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia Kiai Wahab dan ulama Nahdlatul Ulama lainnya setuju menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara.⁴⁵ Ketika dalam Sidang Konstituante saat PKI berusaha memanipulasi ideologinya dari komunisme-leninisme menjadi pendukung Pancasila sebagai dasar Negara, Nahdlatul Ulama dan Kiai wahab sangat khawatir terhadap maneuver politik PKI untuk mengkomunikasikan Pancasila tersebut.

Oleh karena itu Kiai wahab membuat maneuver lain yaitu mengajukan Islam sebagai Dasar Negara, tetap dengan menjunjung

⁴⁵Abdul Mun'im DZ (ed), KH Abdul Wahab CChasbullah: *Kaidah Berpolitik dan Bernegara,,* h. xlvii.

tinggi Pancasila. Karena itu kemudian dalam rapat PBNU 2 Februari 1959 Nahdlatul Ulama mendesakkan bahwa yang harus dijadikan sebagai Dasar Negara adalah Pancasila-Islam, bukan Pancasila-PKI. Rupanya ketua Fraksi PKI, Ir Sukirman tahu maneuver Kiai Wahab sehingga dia dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya PKI sangat setuju dengan Negara Islam yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama karena pada dasarnya yang digagas Nahdlatul Ulama adalah negara Pancasila juga. Hanya saja PKI tidak setuju dengan agagasan negara Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi karena anti Pancasila. Rupanya Bung Karno memahami aspirasi negara Islam Pancasila atau Pancasila Islam yang diusulkan Nahdlatul Ulama, karena itu Bung Karno juga sependapat dengan Nahdlatul Ulama untuk tidak menghidupkan lagi Piagam Jakarta, tetapi menempatkan Piagam Jakarta tetap menjiwai Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana yang diusulkan Nahdlatul Ulama. Dengan semakin tegasnya usul Nahdlatul Ulama itu maka Bung Karno pada 5 Juli 1959 segera mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945, dengan dijiwai Piagam Jakarta. Ini usulan yang diajukan oleh Nahdlatul Ulama dan diterima dengan senang hati oleh Bung Karno karena menjadi titik temu antara kelompok yang menghendaki penghapusan Piagam Jakarta dan kelompok yang ingin menghidupkan Piagam Jakarta, itulah sikap

tawasuth dan *tawazun* (jalan tengah) yang diambil Nahdlatul Ulama diantara kelompok anti dan pro Piagam Jakarta. Nahdlatul Ulama menegaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, sehingga disitu selesailah perdebatan mengenai Dasar Negara. Sikap itu yang kemudian pada Munas NU 1983 dan Muktamar NU 1984 ditegaskan kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ini sebagai bentuk final perjuangan seluruh bangsa termasuk umat Islam Indonesia.⁴⁶

6. *Membangun dan Mengamankan Negara*

Membangun jiwa patriotisme terhadap generasi bangsa untuk mengamankan Negara tentu ini merupakan agenda terbesar sebuah perjuangan bangsa ini, terbesit Kiai Wahab dalam menyampaikan pidatonya dalam berbagai forum-forum yakni, “Perjuangan kita dizaman kemerdekaan tentulah memiliki lapangan yang lebih luas dan lebih leluasa daripada zaman dahulu, dijaman penjajahan Belanda maupun penjajahan Nipon atau jepang.

Maka perjuangan kita tidak hanya meliputi bidang keagamaan dan ekonomi saja seperti dimasa yang sudah-sudah. Tetapi sekarang ini, kita telah biasa berjuang dengan menggunakan sarana politik secara

⁴⁶ Periksa *Hasil Muktamar NU Ke 27 di situbondo, 1984*, (Penerbit: CV Barokah, Semarang 1986) h. 86.

bebas karena kita sudah mencapai kemerdekaan. Selama ini kita melihat degradasinya bangsa dan anak negeri kita, serta kecilnya perhatian dan kepedulian mereka terhadap syariat Islam yang dapat dibuktikan dengan sedikitnya jumlah penuntut ilmu. Padahalnya bermacam-macam ikatan dan sebagian mereka telah membebaskan diri menjadi orang bebas, sehingga tidak bias melaksanakan sholat berjamaah. Di lain pihak sekolah Belanda penuh sesak, sedang mereka sama sekali tidak menghargai umat beragama. Padahal ditangan mereka ada kemegahan, kecendikiawanan dan kekuasaan disegala penjuru, didarat di laut dan setiap peloksok. Pada saat Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang di langsungkan tepatnya di kota Medan pada tahun 1956 telah terjadi peristiwa yang penting dalam sejarah Negara kita. Sekelompok tentara di Sumatera dari Dewan Banteng yang dipimpin Ahmad Husein dan Dewan Gajah yang dipimpin simbolon, melakukan pemberontakan melawan pemerintah pusat guna menuntut keadilan. Hal itu tentu saja telah menajadikan goncangnya kita punya Negara yang baru saja merdeka. Waktu yang telah kita lalui itu adalah pendek, tetapi penuh dengan percobaan dan panacroba. Telah Nampak gejala-gejala yang akan membawa kekeruhan di dalam negeri. Ketika Mukhtamar di medan sedang berlangsung, sehingga kita terpaksa menyelesaikan

Muktamar sebelum waktu semestinya berakhir”.⁴⁷ Berkenaan dengan pemberontakan bersenjata yang membawa korban tak sedikit itu, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah Menyatakan pendiriannya dengan hati yang pilu dan dengan penuh penyesalan, bahwa tidaklah akan membawa suatu kemaslahatan didunia maupun diakhirat, apabila seseorang memihak atau mebanu kepada pemberontak tersebut, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat: 9)⁴⁸

⁴⁷ Abdul Mun'im DZ (ed), KH. Abdul Wahab Chasbullah, *Kaidah Berpolitik dan Bernegara*,,h. 76.

⁴⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pemerintah Provinsi Banten, 2014) h. 516.

Walaupun Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pemberontak PRRI, namun Nahdlatul Ulama tidak tinggal diam dalam mengatasi dan menolong korban PRRI. Bersama masyarakat Sumatera Tengah dan Sumatera Barat untuk membantu korban dengan menyumbang logistic, menyelamatkan harta benda mereka, termasukn masjid dan madrasah yang ditinggalkan lari ke hutan. Ini semua merupakan tanggung jawab kita pada bangsa dan Negara ini.